

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, kemajuan teknologi dan informasi mengalami pertumbuhan yang cepat, yang tercermin dalam munculnya revolusi industri. Industri 5.0 adalah era industri yang ditandai oleh penggunaan teknologi digital, *internet of things*, *big data*, *artificial-intelligence*, dan robotika dalam proses bisnis. Industri 5.0 merupakan lanjutan dari industri 4.0, yang mengintegrasikan teknologi digital dengan sistem fisik (Pradana & Purwanti, 2020). Industri 5.0 menekankan pada kolaborasi antara manusia dan mesin, serta pada personalisasi produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dengan demikian, industri 5.0 dapat meningkatkan keterlibatan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Industri 5.0 juga dapat membuka peluang baru bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, pasar, dan konsumen, serta untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan.

Namun, industri 5.0 juga membawa tantangan baru bagi perusahaan, baik dalam hal operasional, manajerial, maupun akuntansi. Dari sisi operasional, industri 5.0 membutuhkan investasi yang besar, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, dan kebijakan yang mendukung untuk mengimplementasikan teknologi digital, *internet of things*, *big data*, *artificial intelligence*, dan robotika dalam proses bisnis. Dari sisi manajerial, industri 5.0 menuntut perusahaan untuk memiliki visi, misi, strategi, budaya, dan struktur organisasi yang sesuai dengan era industri 5.0, serta untuk melakukan transformasi

digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari sisi akuntansi, industri 5.0 mengharuskan perusahaan untuk mengikuti standar akuntansi, audit, dan pelaporan yang berlaku, serta untuk mengelola risiko, seperti perubahan regulasi, keamanan siber, etika, dan sosial, yang dapat berdampak pada kredibilitas dan akuntabilitas perusahaan. (Pradana & Purwanti, 2020)

Manajemen merupakan salah satu jenis pekerjaan yang cenderung kompleks karena membutuhkan kemampuan yang tinggi dalam hal ketelitian dan ketepatan. Salah satu media komunikasi utama antara manajemen dan investor adalah melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memiliki sejumlah manfaat, seperti membantu dalam memprediksi dan menilai perkembangan bisnis perusahaan, memudahkan pengambilan keputusan, menilai aktivitas investasi perusahaan, dan memberikan manfaat lainnya. Namun, terdapat pula praktik penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, yang dikenal sebagai *fraud*. Cressey (1953) dalam Nurbaya (2022) mengemukakan teori bahwa *fraud* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah tekanan. Faktor ini mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan *fraud*, bahkan dapat menciptakan dorongan lain yang memotivasi pelaku. Sebagai contoh, ketika seseorang terlibat dalam tindakan *fraud*, secara tidak langsung muncul rasionalisasi, yaitu upaya pembenaran terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono & Suryandari (2021) *fraud* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun kelompok,

yang berakibat pada kerugian finansial maupun non-finansial bagi pihak lain. Kejadian *fraud* dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang orang, waktu, atau lokasi, bahkan dapat terjadi di lingkungan akademik (Sukmadilaga *et al*, 2022). Asosiasi Pemeriksa Kejahatan Sertifikasi (ACFE) pada tahun 2022 telah melakukan studi mengenai kecurangan laporan keuangan pada seluruh sektor industri. Hasil studi menunjukkan bahwa sektor finansial memiliki kasus *fraud* dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 351 atau sekitar 22,30% dari total keseluruhan kasus *fraud* yang terjadi yang juga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Data ini juga diilustrasikan dalam tabel yang menunjukkan industri yang paling terdampak oleh *fraud*.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis Industri Tahun 2022

No	Industri	Kasus	Persentase Kasus
1	<i>Banking and financial services</i>	351	22,30%
2	<i>Government and public administration</i>	198	12,57%
3	<i>Manufacturing</i>	194	12,33%
4	<i>Health care</i>	130	8,27%
5	<i>Energy</i>	97	6,16%
6	<i>Retail</i>	91	5,78%
7	<i>Insurance</i>	88	5,60%
8	<i>Technology</i>	84	5,34%
9	<i>Transportation and warehousing</i>	82	5,20%
10	<i>Construction</i>	78	4,95%
11	<i>Education</i>	69	4,38%
12	<i>Information</i>	60	3,82%
13	<i>Food service and hospitality</i>	52	3,30%
	Total	1.574	100%

Sumber: ACFE Report To The Nations (2022).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sektor finansial merupakan sektor yang paling banyak merupakan tindakan kecurangan dengan jumlah

persentase sebanyak 22,30% dari total keseluruhan kasus *fraud* yang terjadi dan kemudian disusul dengan sektor pemerintahan dan administrasi publik yang memiliki jumlah kasus kecurangan sebanyak 198 kasus dengan persentase sejumlah 12,57%. Jumlah kasus yang terjadi pada sektor pemerintahan dan administrasi publik tersebut menggambarkan adanya tantangan serius terkait integritas dan tata kelola dalam sektor tersebut yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pengawasannya terutama pengawasan terkait kecurangan pelaporan keuangan.

Teori *Fraud Pentagon* mulanya diperkenalkan oleh Horwarth pada tahun 2011 sebagai suatu pengembangan dari teori-teori sebelumnya, seperti *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Menurut teori ini, terdapat lima elemen yang selalu terdapat dalam kasus laporan keuangan yang menipu, yaitu peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*) (Wicaksono & Suryandari, 2021).

Fraud Triangle Theory, yang diajukan oleh Cressey pada tahun 1953 menjelaskan beberapa faktor pendorong individu untuk terlibat dalam tindakan penipuan dalam konteks *fraud triangle*. Faktor-faktor tersebut melibatkan tekanan, peluang dan rasionalisasi (Nurbaya, 2022). Tekanan, sebagai faktor pertama, merujuk pada suatu kondisi yang tidak menyenangkan, yang umumnya menjadi beban psikologis. Menurut Abdurrachman & Suhartono (2020), salah satu faktor pendukung tindakan penipuan adalah tekanan hidup, baik dalam bentuk masalah finansial maupun non-finansial, terutama ketika seseorang tidak dapat berbagi masalahnya dengan orang lain. Faktor kedua adalah peluang, Oktaviany & Reskino (2023) menjelaskan bahwa peluang untuk melakukan penipuan dapat muncul karena

dua hal, yaitu pengetahuan *fraudster* tentang seluk-beluk perusahaan, termasuk sistem dan operasionalnya, serta kelemahan dalam fungsi pengendalian perusahaan. Ketika seseorang menghadapi tekanan ekonomi dan melihat adanya peluang untuk melakukan penipuan, mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut adalah solusi untuk menyelesaikan masalah mereka (Oktaviany & Reskino, 2023). Faktor ketiga adalah rasionalisasi. Sukmadilaga *et al* (2022) mendefinisikan rasionalisasi sebagai pembenaran sikap yang diambil sebelum melakukan tindakan kecurangan.

Pada tahun 2004, terjadi penyempurnaan terhadap teori *fraud triangle*. Wolfe dan R. Hermanson melakukan perubahan dari *fraud triangle* menjadi *fraud diamond*, mengembangkan pandangan dari Cressey. Hermanson menambahkan satu faktor kualitatif yang diasumsikan berpengaruh terhadap seseorang terlibat dalam tindakan penipuan, yaitu faktor kemampuan (*capability*) (Pradana & Purwanti, 2020). Dalam upaya mendeteksi penipuan, penting untuk mempertimbangkan elemen keempat ini. Kemampuan individu, yang melibatkan sifat dan keterampilan, memainkan peran sentral dalam kecurangan, bahkan dengan kehadiran tiga unsur lainnya.

Menurut Suyatmiko (2021), *Transparency International* Indonesia (TII) melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 3 poin dibandingkan tahun 2019, dengan skor 37. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang terdaftar.

Pada tahun 2010, terjadi pengembangan kembali atas teori *fraud diamond* yang kemudian menjadi *fraud pentagon theory* yang dikembangkan oleh Jonathan Marks. Marks memperkenalkan elemen tambahan arogansi (*arrogance*) dan

kompetensi (*competence*) pada elemen-elemen sebelumnya yang ada dalam *fraud diamond* (Mohamed *et al*, 2021). Elemen arogansi dalam teori ini menggambarkan sikap sombong dari individu yang merasa bahwa aturan tidak berlaku untuk dirinya sendiri, sehingga seorang individu merasa berani melakukan penipuan. Selanjutnya, elemen kompetensi mengacu pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki pelaku untuk melaksanakan dan menyembunyikan penipuan dengan sempurna. Kompetensi ini mencakup pemahaman teknis yang mendalam, keterampilan dalam menutupi jejak dan pengetahuan tentang bagaimana menghindari sistem pengawasan yang ada (Mohamed *et al*, 2021). Penambahan atas kedua elemen ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penipuan.

Korupsi, sebagai bentuk *fraud*, seringkali sulit dideteksi karena biasanya melibatkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat. Setiap negara memiliki tingkat korupsi yang berbeda, dan informasi serta data mengenai tingkat korupsi dapat diakses dan dibandingkan melalui *Corruption Perception Index* (CPI). *Transparency International* (TI), sebagai lembaga anti korupsi yang didirikan oleh sektor swasta, menciptakan CPI untuk mempromosikan dunia bebas korupsi. Secara bertahap, skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index-CPI*) Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40, menempatkannya di peringkat 85 dari 180 negara. Peningkatan ini didukung oleh data yang diperoleh dari Badan Statistik Nasional tentang Indeks Perilaku Anti-Korupsi tahun 2019. Manajemen memiliki potensi untuk terlibat dalam tindakan *fraud*, seperti yang terjadi pada

kasus PT Jiwasraya pada awal tahun 2020. PT Asuransi Jiwasraya (Tbk) mengalami kegagalan pembayaran polis asuransi JS Saving Plan akibat adanya praktik kecurangan di perusahaan tersebut. Menurut BPK, praktik *fraud* di Jiwasraya melibatkan peran akuntan, dengan perusahaan tersebut mencatatkan laba sejak tahun 2006 hingga 2019. Pada tahun 2017, Jiwasraya bahkan mencatatkan laba sebesar Rp 360,3 miliar. Oleh karena itu, Jiwasraya diberikan opini tidak wajar dalam laporan keuangannya (CNN Indonesia, 2020).

Selain kasus diatas, tindak penipuan juga terjadi pada tahun 2024 ini yang melibatkan mantan karyawan PT Aneka Tambang, Tbk. Berdasarkan laman berita www.metro.tempo.co.id kerugian yang ditimbulkan atas tindak penipuan ini mencapai 9.7 Triliun Rupiah. Penipuan yang terjadi ini sangat relevan dengan elemen kompetensi karena beberapa pelaku adalah oknum yang bekerja di PT Aneka Tambang, Tbk yang kemungkinan besar memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem operasional dan prosedur perusahaan. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi celah dalam sistem, seperti menetapkan harga jual emas di bawah harga yang ditetapkan dengan alasan adanya diskon. Para pelaku ini juga memiliki keterampilan untuk melakukan transaksi di luar mekanisme resmi yang ditetapkan oleh PT Aneka Tambang, Tbk, sehingga sulit bagi perusahaan untuk mengontrol keluar masuknya logam mulia dan jumlah uang yang ditransaksikan. Selain itu, kemampuan untuk membuat surat-surat palsu yang menyatakan seolah-olah transaksi telah dilakukan dengan benar menunjukkan tingkat kompetensi yang tinggi dalam memalsukan dokumen dan menutupi jejak penipuan.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat *gap* antara teori dengan praktik, dimana secara teoritis, seorang manajer diharapkan memiliki integritas, kejujuran, dan transparansi dalam menjalankan setiap tugasnya karena hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap profesi mereka (Mohamed *et al*, 2021). Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak oknum manajemen rentan terhadap pengaruh dan terprovokasi untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Perbedaan signifikan terlihat antara data yang dilaporkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut ACFE, tingkat korupsi masih tinggi dengan angka mencapai 70%, sementara BPS mencatat penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) pada tahun 2019 (Muningsih & Muliati, 2020).

Penelitian (Christian & Julyanti, 2021) menguji pengaruh *fraud pentagon* terhadap *fraudulent financial reporting* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan elemen-elemen dalam *fraud pentagon* yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi sebagai variabel independen yang akan mendeteksi *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *financial target* (ROA), kualitas auditor eksternal (AUD), *external pressure* (LEV), pergantian direksi perusahaan (DCHANGE) dan *frequent number of ceo's picture* (CEOPIC) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti merasa termotivasi untuk mengadakan penelitian ini atas beberapa alasan yang salah satunya adalah karena kejadian kecurangan dalam terutama dalam ruang lingkup manajemen masih sering

terjadi, sehingga perlu untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan (*fraud*) (Wahyuningtiyas & Pramudyastuti, 2022). Selanjutnya, berdasarkan penelitian ACFE tahun 2019 bahwa industri keuangan dan perbankan merupakan industri yang paling dirugikan akibat adanya *fraud* sebesar 41,1%. Angka tersebut dapat dikatakan tinggi, sehingga perlu dilakukan penelitian penyebab tingginya angka *fraud* di industri perbankan. Selain itu, terdapat gap antara teori dengan praktiknya. Terakhir, hasil penelitian ini memungkinkan membantu berbagai pihak seperti, akuntan, manajemen dan IAPI dalam melakukan tindakan preventif untuk terjadinya *fraud* di masa yang akan datang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan tahun pengambilan data. Populasi penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tentunya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul pada penelitian ini sebagai **“Pengaruh *Fraud Pentagon Theory* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk:

1. Menginvestigasi *pengaruh Fraud Pentagon Theory* terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan, dengan fokus pada studi kasus pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dalam periode 2020-2023.

2. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN selama periode yang diteliti.

1.3 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini memiliki fokus utama yang terletak pada tindakan penipuan dalam ranah manajemen, khususnya dalam pelaporan keuangan. Akar masalahnya dapat ditelusuri pada peningkatan kasus penipuan dalam manajemen, terutama di sektor pemerintahan dan administrasi publik yang menempati posisi kedua atas terjadinya kasus kecurangan yang terjadi yaitu sebanyak 12,57% dari total keseluruhan kasus. Berdasarkan pemaparan latar belakang dan ruang lingkup penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tekanan terhadap Kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh Peluang terhadap Kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

4. Bagaimana pengaruh Kompetensi terhadap Kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
5. Bagaimana pengaruh Arogansi terhadap Kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki dan memahami pengaruh *Fraud Pentagon Theory* terhadap kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan terkait kecurangan dalam laporan keuangan yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara menganalisis pengaruh *fraud pentagon theory* terhadap kecurangan dalam laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan untuk menambah hasil yang nantinya akan mendukung hasil penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang mana nantinya

akan menjadi tolak ukur apakah hasil penelitian sebelumnya sudah konsisten dengan hasil penelitian yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Bagi Investor, penelitian ini dapat diharapkan menjadi acuan dalam menilai kinerja perusahaan yang digunakan sebelum melakukan investasi saham.

b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi acuan dalam menilai kinerja perusahaan yang digunakan sebelum melakukan investasi saham.